

# Kajian Desa Mandiri Pangan Kabupaten Bekasi

*Pipit Septi Fitriyanti<sup>1</sup>, Rizky Afnan Fadillah<sup>2</sup>, Fauziah<sup>3</sup>*

## INFO NASKAH

### RIWAYAT NASKAH :

Diterima September 2024  
Diterima setelah revisi Oktober 2024  
Terbit Desember 2024

### KEYWORDS :

Independent Village  
Food security

## ABSTRACT

*Food security is a polemic that often occurs in various villages. The application of the Desa Mandiri Pangan is expected to be a solution to the limited availability of food in the village area, especially villages in Bekasi Regency. Data collection techniques and analysis of secondary data were carried out to obtain an index of village readiness in establishing an independent village food security program. The results of the analysis obtained that some villages have met the criteria for the application of Desa Mandiri Pangan program in Bekasi District. It is necessary to review the process of fulfilling the criteria in several villages so that Desa Mandiri pangan program in Bekasi District can be carried out as a whole.*

## ABSTRAK

Keterbatasan dan masalah ketahanan pangan merupakan polemik yang seringkali terjadi diberbagai desa. Pengaplikasian Desa Mandiri Pangan diharapkan dapat menjadi solusi dari keterbatasan ketersediaan pangan yang ada di kawasan desa khususnya desa di Kabupaten Bekasi. Dilakukan teknik pengumpulan data dan analisis dari data sekunder untuk mendapatkan indeks kesiapan desa dalam membentuk program ketahanan pangan desa mandiri. Hasil analisis diperoleh sebagian desa sudah memenuhi kriteria untuk pengaplikasian program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bekasi. Perlu ditinjau kembali untuk proses pemenuhan kriteria di beberapa desa agar program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bekasi dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kata kunci : desa mandiri, ketahanan pangan

## 1. Pendahuluan

Kewajiban pemerintah dalam penyediaan pangan pokok diperuntukkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan makanan utama sehari-hari dengan tidak mengabaikan potensi sumberdaya lokal dan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang. Komitmen pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang pangan ini menjadi dasar kerangka kerja untuk pengelolaan pangan nasional yang harus dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang memberikan penekanan pada pentingnya aspek gizi selain mencukupi kebutuhan pangan. Peningkatan perhatian pada gizi bukan tanpa alasan karena di negara berkembang seperti Indonesia, malnutrisi, terutama pada anak-anak, masih menjadi masalah yang serius.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 menetapkan arah dan tujuan untuk pencapaian ketahanan pangan dan gizi. Kebijakan strategis ini tidak hanya menargetkan produksi pangan tetapi juga upaya peningkatan konsumsi pangan bergizi dan beragam oleh masyarakat. Perpres ini merupakan langkah dan upaya pemerintah dalam meningkatkan sinergi dan koordinasi program serta kebijakan antarkementerian dan juga

<sup>1</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, (email : [pipitsepti9@gmail.com](mailto:pipitsepti9@gmail.com) )

<sup>2</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, (email : [twinkholic@gmail.com](mailto:twinkholic@gmail.com) )

<sup>3</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi

pemangku lain, termasuk pemerintah daerah. Inisiasi peningkatan ketahanan pangan telah dilakukan melalui adanya Permentan RI No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan. Peraturan ini mengimplementasikan konsep dan program Desa Mandiri Pangan (DMP) agar desa tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen pangan. Peraturan dan kebijakan yang diupayakan oleh pemerintah pusat juga disambut dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten. Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, telah lama menetapkan Perda No. 4 Tahun 2012 dan Pergub Jabar No. 67 Tahun 2013 dalam upaya memperkuat kerangka kerja untuk kemandirian pangan daerah. Demikian juga dengan pemerintah Kabupaten Bekasi, yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, telah mengeluarkan serangkaian regulasi seperti Perbup Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 dan Perbup Bekasi No. 94/2014 yang berkaitan dengan pangan. Regulasi-regulasi ini menekankan pada pentingnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten, termasuk peningkatan produksi lokal, pengembangan infrastruktur pertanian, dan pendidikan gizi bagi masyarakat. Program desa mandiri pangan merupakan upaya strategis untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kemiskinan. Pembangunan desa mandiri pangan diharapkan akan mendorong pengembangan potensi sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan partisipasi semua lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang semakin kuat. Latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a) Belum terpenuhinya pangan bagi masyarakat, rumah tangga sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
- b) Belum terpenuhinya pangan yang beranekaragam dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat masyarakat, rumah tangga ataupun perseorangan dengan memperkuat kelembagaan pangan desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat;
- c) Belum meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga, mengentaskan desa rentan rawan pangan, membentuk desa mandiri pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan pencapaian kemandirian pangan daerah serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa secara berkelanjutan. Adapun tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung pencapaian ketahanan pangan masyarakat dan mewujudkan desa mandiri pangan;
- b. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam di desa, baik pangan nabati maupun hewani dan air, yang diolah maupun tidak diolah yang memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal
- c. Mendukung upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat rawan pangan

Adapun target dan sasaran dari kegiatan penelitian ini adalah:

- a. Tertanganinya desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat

- b. Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi.

Dan serangkaian kegiatan kajian ini lingkungannya adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasi kesiapan desa mandiri pangan di Kabupaten Bekasi dalam status tahap I persiapan, tahap II, penumbuhan, tahap III pengembangan dan tahap IV tahap kemandirian;
- b) Analisis potensi desa menuju desa mandiri pangan di Kabupaten Bekasi;  
Perumusan rekomendasi kebijakan dalam kajian desa mandiri pangan di Kabupaten Bekasi.

Sistem pangan sebagai sebuah kesatuan ekosistem dalam menyediakan berbagai jenis makanan untuk memenuhi asupan gizi juga dapat menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat desa (Woodhill dkk., 2022). Dalam konteks kontribusi dari sumberdaya alam sebagai bagian dari keamanan pangan sehari-hari, kapasitas dan daya dukung lingkungan dapat mencerminkan tingkat ketersediaan makanan yang menurun (Vågsholm, Arzoomand, & Boqvist, 2020). Kondisi yang sering dikenali dalam konsep ketahanan pangan sebenarnya hanya ada dua yang pokok yaitu ketahanan pangan (*food security*) dan kerentanan pangan (*food vulnerability*). Jika kemandirian pangan diaplikasikan pada level daerah maka bisa didefinisikan sebagai kemampuan wilayah atau daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam wilayahnya sendiri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

## 2. Metodologi Penelitian

*focus group discussion* (FGD). FGD ini akan dilakukan di beberapa desa yang dianggap dapat menjawab tujuan penelitian. FGD penting dilakukan karena data-data sekunder tidak cukup untuk menjelaskan potensi dan kesiapan desa menuju desa mandiri pangan.

**Tabel 2.1.** Aspek, Variabel, dan Indikator Kajian Desa Mandiri Pangan

Aspek	Variabel	Indikator	Sumber
Sumber Daya Alam	Ketersediaan Pangan	Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan	PODES 2021
	Ketersediaan Air	Adanya sungai, saluran irigasi, danau/waduk/situ/bendungan, dan embung untuk pengairan/irigasi	PODES 2021
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	Prevalensi stunting	Pemkab Bekasi
	Pendidikan	Keterjangkauan akses pendidikan menengah	PODES 2021
Infrastruktur	Transportasi	Jalan darat antar desa/kelurahan ke/dari sentra produksi pertanian dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih	PODES 2021

	Komunikasi	Kualitas sinyal internet HP	PODES 2021
Lembaga & Pelaku Ekonomi	BUMDesa	Jumlah Unit Usaha BUMDesa	PODES 2021
	UMKM	Jumlah industri mikro dan kecil sub sektor makanan	PODES 2021
	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok tani	PODES 2021
Daya Beli	Kemiskinan	Jumlah surat miskin/SKTM yang dikeluarkan desa	PODES 2021
Kohesi Sosial	Konflik Horizontal	Frekuensi perkelahian massal	PODES 2021
Bencana	Bencana Alam	Frekuensi bencana alam	PODES 2021

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah dikumpulkan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor per indikator yaitu 1 – 4. Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan setelah skoring per dimensi selesai. Skoring per dimensi tersebut kemudian ditransformasikan menjadi indeks setelah dikalikan dengan bobot masing-masing dimensi dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Indeks Kesiapan Demapan} = \sum_i^n \text{Bobot} \times \left( \frac{\text{Skor per Dimensi}}{\text{Jumlah Indikator}} \right)$$

Penentuan desa dalam rangka persiapan implementasi desa mandiri pangan dihitung dan diklasifikasikan berdasarkan hasil indeks yang memiliki rentang angka indeks. Angka indeks ini kemudian dihitung secara proporsional pada skoring dan segmentasi nilai sebagai berikut.

**Tabel 2.2** Skoring Data dan Status Indeks Kesiapan Desa Mandiri Pangan

Skor 1-10	Skor 1-3,5	Kesiapan Desa Mandiri Pangan
1	<2,000	Sangat belum siap / Prioritas 1
2	2,000 - 2,250	Belum siap / Prioritas 2
3	2,251 - 2,500	Agak siap / Prioritas 3
4	2,501 - 3,000	Siap / Prioritas 4
5	> 3,000	Sangat Siap / Prioritas 5

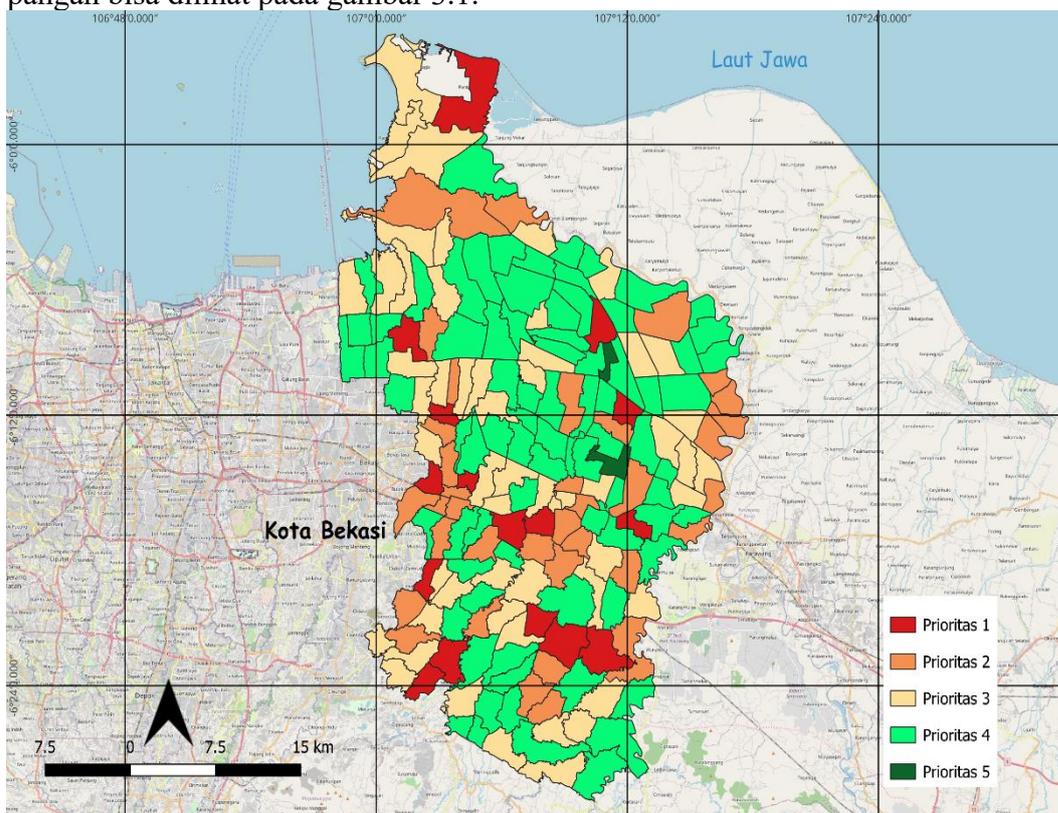
### 3. Hasil dan Pembahasan

Sebagai wilayah yang semakin berkembang dan urbanisasi, Bekasi menghadapi dilema dalam mempertahankan lahan pertaniannya. Tuntutan lahan untuk sektor industri, jasa, dan permukiman terus meningkat, sementara lahan pertanian yang ada mulai berkurang dan terpinggirkan. Hal ini tentu saja menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya menjaga ketersediaan pangan lokal yang berkelanjutan, antara lain:

- Pertama, berkurangnya lahan pertanian berarti penurunan produksi pangan lokal.
- Kedua, konversi lahan pertanian ke sektor lain seringkali mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian utama mereka.
- Ketiga, berkurangnya lahan pertanian juga mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati lokal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep "urban farming" atau pertanian perkotaan, yang memungkinkan produksi pangan di tengah kawasan perkotaan dengan memanfaatkan lahan sempit, atap rumah, atau bahkan vertikal farming dengan sistem hidroponik seperti yang dilakukan oleh PKK Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan. Selain itu, pemberian insentif bagi petani untuk mempertahankan lahan pertaniannya dan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati dapat menjadi solusi lainnya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Kabupaten Bekasi dapat memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya tidak mengorbankan ketahanan pangan dan keberlanjutan daya dukung lingkungan.

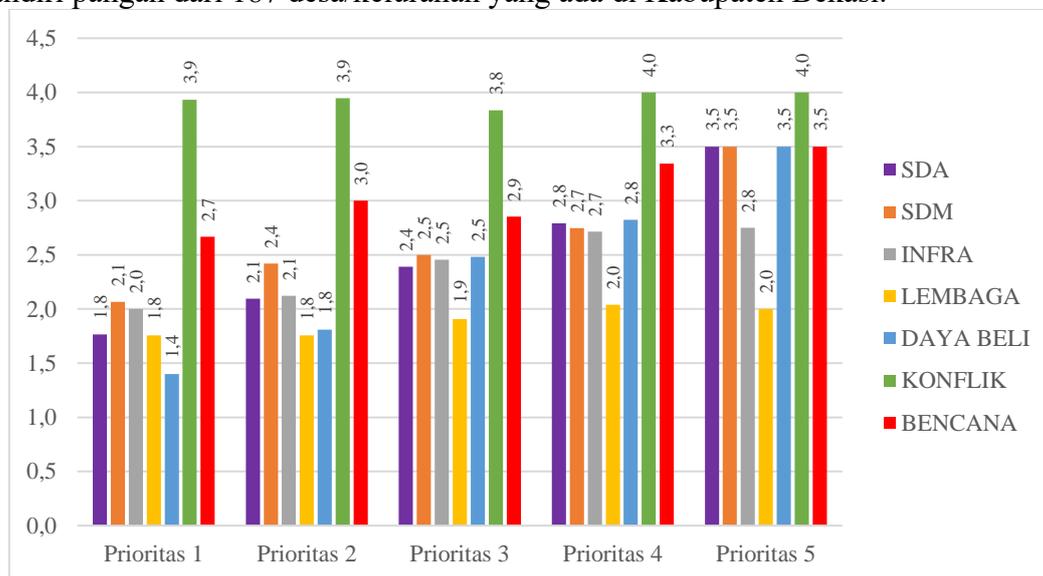
Berdasarkan analisis komposit, didapatkan nilai Indeks Kesiapan Desa Mandiri Pangan untuk 187 desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi. Nilai rata-rata Indeks Kesiapan Demapan Bekasi berada di angka 2.43. Dari 187 desa/kelurahan yang ada di Bekasi, sekitar 88 desa yang skor indeksnya berada di bawah rata-rata dan 99 desa yang nilai indeksnya di atas 2.43. paparan desa yang siap melaksanakan program desa mandiri pangan bisa dilihat pada gambar 3.1.



**Gambar 3.1.** Peta Kesiapan Desa Mandiri Pangan Kabupaten Bekasi  
Sumber: Perhitungan hasil indeks, diolah

Selanjutnya, ada 4 desa yang memiliki nilai indeks terendah yaitu Desa Harjamekar - Kecamatan Cikarang Utara, Desa Karang Bahagia – Kecamatan Karang Bahagia, Desa Tridaya Sakti - Kecamatan Tambun Selatan, dan Desa Jatibaru – Kecamatan Cikarang Timur. Dengan skor yang sangat rendah, keempat desa tersebut dianggap sebagai desa yang sangat tidak siap untuk menjadi desa mandiri pangan. Dengan kata lain, keempat desa tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius daripada desa/kelurahan lain dari Pemkab Bekasi jika ingin mengangkat keempat desa tersebut menjadi desa mandiri pangan.

Sementara itu, 4 desa dengan skor indeks tertinggi antara lain Desa Jaya Sempurna – Kecamatan Serang Baru, Desa Kertamukti – Kecamatan Cibitung, Desa Karang Rahayu – Kecamatan Karang Bahagia, dan Desa Sukadarma – Kecamatan Sukatani. Yang menarik di sini, hanya ada 2 desa yang masuk sebagai prioritas 5, yaitu Desa Karang Rahayu – Kecamatan Karang Bahagia dan Desa Sukadarma – Kecamatan Sukatani. Kedua desa tersebut dapat dianggap sebagai desa yang paling siap untuk menjadi desa mandiri pangan dari 187 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi.



**Gambar 3.2.** Perbandingan Dimensi Berdasarkan Wilayah Prioritas

Sumber: hasil perhitungan indeks, diolah

Dilihat berdasarkan wilayah prioritas, dimensi yang terlihat perbedaan secara mencolok adalah dimensi daya beli. Desa yang masuk dalam Prioritas 1 rata-rata berdaya beli rendah dibandingkan desa yang masuk dalam Prioritas 2, 3, 4, dan 5. Begitu pun dengan dimensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Makin prioritas suatu desa/kelurahan, maka skor desa/kelurahan tersebut untuk aspek sumber daya alam dan manusia juga cenderung makin rendah. Implikasinya, Pemkab Bekasi perlu lebih serius dalam aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, daya beli, peningkatan pelaku ekonomi serta aspek infrastruktur untuk desa/kelurahan yang masuk dalam Prioritas Utama (Prioritas 1 dan 2) supaya bisa naik level lebih tinggi (Prioritas 3, 4, atau 5).

**Tabel 3.1.** Rincian Kategori Prioritas Desa di Kabupaten Bekasi

No	Kategori	Presentase Desa (%)	Jumlah Desa	Indikator Perbaikan
1.	Prioritas 1	1,4	15	Daya beli masyarakat;

<sup>1</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, (email : [pipitsepti9@gmail.com](mailto:pipitsepti9@gmail.com))

<sup>2</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, (email : [twinkholic@gmail.com](mailto:twinkholic@gmail.com))

<sup>3</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan kelembagaan petani dan BUMDes;</li> <li>- Penguatan kapasitas IMK;</li> <li>- Jaminan ketersediaan sumberdaya alam;</li> <li>- Perbaikan kualitas infrastruktur.</li> </ul>
2.	Prioritas 2	19,8	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan kelembagaan petani dan peningkatan kemampuan petani;</li> <li>- Peningkatan pelaku ekonomi (IMK makanan dan BUMDes);</li> <li>- Perbaikan kualitas infrastruktur.</li> </ul>
3.	Prioritas 3	28,9	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan kelembagaan petani dan peningkatan kemampuan petani;</li> <li>- Peningkatan pelaku ekonomi (IMK makanan dan BUMDes);</li> <li>- Perbaikan kualitas infrastruktur.</li> </ul>
4.	Prioritas 4	48,8	79	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan kelembagaan petani dan peningkatan kemampuan petani;</li> <li>- Perbaikan kualitas infrastruktur.</li> </ul>
5.	Prioritas 5	1,1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan kelembagaan petani dan peningkatan kemampuan petani;</li> <li>- Perbaikan kualitas infrastruktur.</li> </ul>

#### 4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Desa mandiri pangan merupakan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan kekurangan dan kelebihan yang ada masih berjalan sampai sekarang. Dari hasil kesimpulan kajian desa mandiri pangan ini maka pemerintah Kabupaten Bekasi perlu melakukan kebijakan afirmatif dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi potensi dan peluang peningkatan kapasitas kelembagaan pangan desa dalam mencapai kemandirian pangan. Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil kajian ini adalah:

1. Pemerintah kabupaten Bekasi dapat memanfaatkan hasil kajian dari peta kesiapan desa dalam menentukan lokasi desa yang akan menjadi pilot project dalam melaksanakan program desa mandiri pangan berdasarkan panduan dari Permentan RI No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Pedoman Desa Mandiri. Penetapan lokasi pilot project dapat dipertimbangkan pada beberapa desa yang sudah memiliki kesiapan yang tinggi (kategori 4 “siap” dan kategori 5 “sangat siap”) dan juga desa

dalam kategori kesiapan rendah (kategori 3 “agak siap”) dengan mengkaji aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menjadikan desa tersebut bisa mencapai tahap kemandirian pangan (Tahap IV).

2. Pemerintah kabupaten Bekasi perlu mempertimbangkan perwujudan wilayah kemandirian pangan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10/KPTS/KN.030/K/02/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan yang menggabungkan beberapa desa dalam satu kesatuan wilayah kemandirian pangan. Hal ini terutama dilakukan pada desa-desa yang masuk dalam kategori 1 “sangat belum siap” menjadi desa mandiri pangan.
3. Untuk mewujudkan desa mandiri pangan, pemerintah perlu lebih khusus memberikan perhatian pada upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing desa yang ada disetiap prioritas dalam kesiapannya menjadi desa mandiri pangan. Pemerintah dapat memberikan intervensi kebijakan, program, dan proyek pembangunan dalam upaya menjaga kawasan sumberdaya pertanian, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan, penguatan kelembagaan ekonomi dan pengolahan komoditi pertanian.
4. Terdapat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa, khususnya kelompok rentan rawan pangan karena faktor ekonomi dengan melibatkan kelompok masyarakat ini dalam pengembangan desa wisata dan aktivitas ekonomi produktif dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal melalui kegiatan pengolahan produk pangan dengan melibatkan kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat seperti PKK dan melibatkan peran pihak swasta yang ada di sekitar wilayah desa
5. Dalam upaya peningkatan kemandirian pangan desa, pemerintah kabupaten Bekasi perlu untuk semakin meningkatkan kapasitas petani dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan tentang teknik pertanian modern dan manajemen usaha agribisnis melalui berbagai program pemberdayaan petani yang dijalankan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat seperti program Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS), petani milenial, dan lain-lainnya .
6. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan koordinasi dalam menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan khususnya yang mendukung sektor pertanian seperti jaringan irigasi, normalisasi daerah aliran sungai, dan upaya pencegahan bencana banjir di lokasi desa rawan bencana alam. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan infrastruktur secara berkala agar bisa dilakukan perbaikan bila terjadi kerusakan atau gangguan fungsi sarana dan prasarana untuk mendukung proses produksi pangan, distribusi produk pangan, akses pasar, dan keterjangkauan harga pangan bagi seluruh masyarakat.
7. Pemerintah kabupaten Bekasi dapat mengintensifkan kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta untuk membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui tanggungjawab sosial perusahaan khususnya pada penguatan kelembagaan ekonomi dan pangan desa, meningkatkan nilai tambah produk olahan pangan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat, dan mengoptimalkan lahan pertanian yang masih ada di desa-desa di Kabupaten Bekasi agar tetap produktif.

## Daftar Pustaka

- Anderson, K., Jha, S., Nelgen, S., dkk., (2013). Re-examining policies for food security in Asia. *Food Sec.* 5, 195–215. <https://doi.org/10.1007/s12571-012-0237-5>.
- Angon, P.B., & Islam, Md.S., (2022). A Comparative Analysis Between Food Affordability and Healthy Life Among The Rural and Urban People of Bangladesh, *IPTEK The Journal of Technology and Science*, 33(2), DOI: 10.12962/j20882033.v33i2.13552
- Badan Pusat Statistik, (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, (2023). *Statistik Kabupaten Bekasi 2023*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, Bekasi
- Bishwajit, G., Sarker, S., Kpoghomou, M.A., dkk., (2013). Self-sufficiency in rice and food security: a South Asian perspective. *Agric & Food Secur* 2, 10. <https://doi.org/10.1186/2048-7010-2-10>.
- Capaldo, J., Karfakis, P., Knowles, M., Smulders M (2010). A Model of Vulnerability to Food Insecurity. *ESA Working Paper Series No.10-03*. Rome: Food and Agriculture Organisation of the United Nations
- Chrisendo, D., dkk., (2020). Land-use change, nutrition, and gender roles in Indonesian farm households, *Forest Policy and Economics*, 118, 102245, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102245>
- Kemenkes RI, (2023). “Dua Fokus Intervensi Penurunan Stunting untuk Capai Target 14% di Tahun 2024”, *Berita online, Humas BKPK, Kemenkes RI*, tersedia online di <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/dua-fokus-intervensi-penurunan-stunting-untuk-capai-target-14-di-tahun-2024/>
- Vågsholm I, Arzoomand NS and Boqvist S (2020) Food Security, Safety, and Sustainability—Getting the Trade-Offs Right. *Front. Sustain. Food Syst.* 4:16. doi: 10.3389/fsufs.2020.00016
- Woodhill, J., Kishore, A., Njuki, J., Jones, K., Hasnain, S., (2022). Food systems and rural well being: challenges and opportunities. *Food Sec.* 14, 1099–1121. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01217-0>
-